

ABSTRAK

Tindak pidana perikanan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan segala kegiatan perikanan, mulai dari tahap pengelolaan hingga pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah kedaulatan Indonesia. Tindak pidana perikanan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yang salah satunya seperti kasus pada putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2027/PN. Tpg, terdakwa bernama Vo Anh Qouc, tempat lahir Binh Thuan Vietnam yang berumur 36 tahun berjenis kelamin laki-laki berkebangsaan Vietnam yang bertempat tinggal di Cat Tien Phucat Binh Dinh Vietnam berprofesi sebagai seorang Nahkoda dari kapal KM. BD 31164 TS.

Terdakwa melakukan tindak pidana perikanan yang bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu laut natuna. Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi surat yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap pasif yang berupa alat pancing cumi.

Kasus putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2027/PN. Tpg permasalahan terletak pada pertimbangan hakim dimana mempertimbangkan hanya memberikan pidana utama berupa pidana denda, akan tetapi dengan menerapkan itu dapat menimbulkan beberapa permasalahan misalnya apabila terdakwa tidak mampu membayarkan sejumlah denda, sehingga dengan ini dapat dikatakan pertimbangan hakim tersebut kurang tepat.

Kata kunci : Tindak pidana perikanan, pertimbangan hakim, ZEEI

ABSTRACT

Fisheries crime is a violation of laws and regulations relating to all fishery activities, from the management stage to the utilization of fish resources in the Indonesian sovereign territory. Fisheries crimes can be grouped into several types, one of which is the case in the decision Number: 31/Pid.Sus-Prk/2027/PN. Tpg, the defendant named Vo Anh Qouc, the birthplace of Binh Thuan Vietnam, 36 years old, male, Vietnamese national, who lives in Cat Tien Phucat Binh Dinh Vietnam by profession as a captain of the KM ship. BD 31164 TS.

The defendant committed a fishery crime located in the fishery management area of the Republic of Indonesia, namely the Natuna Sea. The defendant carried out fishing activities that were not accompanied by a valid letter from the Indonesian Government, namely not having a Fishing Permit (SIPI). Fishing is carried out using passive fishing gear in the form of squid fishing rods.

Decision case Number: 31/Pid.Sus-Prk/2027/PN. But the problem lies in the judge's consideration which considers only giving the main punishment in the form of a fine, but applying it can cause several problems, for example if the defendant is unable to pay a number of fines, so it can be said that the judge's consideration is not right.

Keywords : fisheries crime, judge's consideration, ZEEI